



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO INSPEKTORAT

Jalan Benteng Pancasila No. 23 Telepon (0321) 399630

Email : inspektorat@mojokertokota.go.id ; website : inspektorat.kotamojokerto@gmail.com

MOJOKERTO 61314

Nomor : 700/1047.2/417.400.4/2021 Mojokerto, 21 September 2021
Lampiran : 1 (satu) halaman K e p a d a
Sifat : Penting Yth. Ibu. Walikota Mojokerto
Perihal : Hasil Evaluasi SAKIP OPD di
Tahun 2021 MOJOKERTO

Sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun 2021, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tim Inspektoral melaksanakan entry meeting eva/uasi SAKJP secara virtual yang dihadiri para sekretaris semua OPD dan/atau pejabat yang ditugaskan.
2. Perangkat Daerah mengisi Lembar Ketja Evaluasi(LKE) secara self assessment, disertai data/bukti pendukung.
3. Tim Evaluator melaksanakan evaluasi dokumen dan wawancara dengan pejabat eselon 3, eselon 4 dan pejabat pelaksana yang menangani SAKIP.
4. Tim Evaluator melaksanakan telaah sejawat antar wilayah inspektur pembantu agar terdapat kesamaan persepsi penilaian dan pemahaman antar evaluator
5. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi(LHE) dilakukan setelah LKE Final disepakati Pimpinan OPD.

Daftar nilai implementasi SAKIP perangkat daerah sebagaimana terdampir.

Simpulan implemenasi SAKIP OPD Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja.
Perencanaan kinerja pada umumnya masih belum baik, antara lain :
 - a. Isu strategis yang diuraikan di dalam rentra OPD belum menggambarkan permasalahan strategis yang dihadapi.
 - b. Program/kegiatan belum merupakan cara untuk mencapai lujuan dan sasaran(belum selaras), karena belum memenuhi kriteria sebab-akibat langsung terwujudnya tujuan dan sasaran.
 - c. Perjanjian kinerja eselon 3 dan 4 masih banyak yang belum relevan. Hal ini dikarenakan penunjukan pejabat Eselon III/PII. Eselon III selaku PPTK belum selaras dengan pelaksanaan Peraturan Menteri

Dalam Negeri No 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yaitu perubahan komposisi klasifikasi program menjadi kegiatan, dan kegiatan menjadi sub kegiatan termasuk indikatomya.

- d. Beberapa Indikator program dan kegiatan belum smart (specific, measurable, attainable, relevan, dan time bond).
- e. Penyajian dokumen perencanaan belum konsisten antar bab dan belum konsisten antar dokumen perencanaan.

Terhadap permasalahan di atas, diperdukan perbaikan kualitas dokumen perencanaan kinerja. Untuk itu kami menyarankan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan segera melakukan asistensi/pendampingan perbaikan Renstra dan Renja perangkat daerah dengan mengundang narasumber yang kompelen.

2. Pengumpulan data kinerja dan monitoring dan evaluasi kinerja, Data kinerja yang disediakan oleh OPD belum dapat diandalkan dan diragukan validitasnya. Monitoring dan evaluasi kinerja masih bersifat fonnalilas belum mendukung substansi perbaikan kinerja eselon 2 dan eselon/pejabat di bawahnya. Kami menyarankan semua Pimpinan OPD untuk lebih cermat terkait dengan kualitas data kinerja dan melakukan monitoring/evaluasi secara periodik alas kinerja OPD masing-masing.
3. SDM yang menangani kinerja.

SDM yang ditugaskan menangani kinerja perlu dilakukan bimbingan teknis oleh narasumber yang kompeten sehingga terdapat pemahaman yang baik terkait manajemen kinerja. Kami menyarankan Kepala Bagian Organisasi untuk melaksanakan kegiatan bimbingan teknis/asistensi kepada semua OPD agar permasalahan perbaikan kinerja dapat segera teratasi.

Atas perhatiaanya kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR KOTA MOJOKERTO

MUH. SUGENG, SE, M.Si, Ak, C.A. CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19631212 198302 1 001

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
2. Yth. Sdr Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;

LAMPIRAN NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	KATERGORI
1	Sekretariat Daerah	85,54	A
2	Dinas Perhubungan	85,02	A
3	Inspektorat	84,44	A
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	81,82	A
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	81,47	A
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,06	A
7	Kecamatan Prajurit Kulon	79,91	BB
8	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	78,97	BB
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78,68	BB
10	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo	78,31	BB
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	78,14	BB
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	78,07	BB
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	77,62	BB
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	77,04	BB
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	77,03	BB
16	Dinas Lingkungan Hidup	76,31	BB
17	Kecamatan Kranggan	74,10	BB
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	73,60	BB
19	Sekretariat Dewan	73,33	BB
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	72,23	BB
21	Satuan Polisi Pamong Praja	72,14	BB
22	Kecamatan Magersari	70,71	BB
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	70,31	BB
24	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	70,04	BB
25	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	66,39	B